
STRATEGI PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN POKOK

Faisal Sani^{1*}, Rizki Hegia Sampurna², Yana Fajar FY Basori³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Email: faisalsani@ummi.ac.id¹, rizkicdn@ummi.ac.id², yanafajar@ummi.ac.id³

Alamat: Jalan R. Syamsudin, S.H. No. 50, Kota Sukabumi.

Korespondensi penulis: faisalsani@ummi.ac.id

Abstract. Food price fluctuations and inflation in Sukabumi City are triggered by limited land and reliance on external supplies. Responding to this phenomenon, the local government's stabilization strategy is examined qualitatively using the Strategy Change Cycle framework. Analytical findings reveal that market interventions like the Cheap Food Movement and Subsidized Market Operations coordinated by TPID effectively dampen short-term price spikes. However, the implemented strategies remain reactive, constrained by budget capacities, and fail to address structural root problems. Therefore, the direction of local policies must shift toward a preventive approach by strengthening regional food reserves and developing local commodities to achieve sustainable food independence.

Keywords: Food Price Stability, Government Strategy, Inflation, Strategy Change Cycle, Sukabumi City.

Abstrak. Fluktuasi harga pangan dan inflasi di Kota Sukabumi dipicu oleh keterbatasan lahan dan ketergantungan pasokan eksternal. Merespons fenomena ini, strategi stabilisasi harga oleh pemerintah daerah dikaji secara kualitatif deskriptif menggunakan kerangka Strategy Change Cycle. Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Bersubsidi yang dikoordinasikan TPID cukup efektif meredam gejolak harga jangka pendek. Namun, strategi yang dijalankan masih bersifat reaktif, terkendala oleh kapasitas anggaran, dan belum menyentuh akar permasalahan struktural. Oleh karena itu, arah kebijakan daerah perlu digeser menuju pendekatan preventif melalui penguatan cadangan pangan serta pengembangan komoditas lokal guna mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan

Kata kunci: Inflasi, Kota Sukabumi, Stabilitas Harga Pangan, Strategi Pemerintah, Strategy Change Cycle.

1. LATAR BELAKANG

Stabilitas harga pangan pokok merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, ketahanan pangan, inflasi daerah, dan stabilitas sosial-ekonomi. Pangan pokok tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai komoditas strategis yang pergerakan harganya dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ketika harga pangan mengalami kenaikan secara signifikan, masyarakat tidak hanya menghadapi beban ekonomi yang lebih berat, tetapi juga berpotensi mengalami penurunan kualitas konsumsi karena terdorong memilih bahan pangan yang lebih murah dengan kualitas gizi yang lebih rendah.

Dalam konteks Kota Sukabumi, persoalan stabilitas harga pangan pokok menjadi semakin penting karena karakteristik wilayahnya memiliki keterbatasan dalam sektor

pertanian. Kota Sukabumi memiliki luas wilayah yang relatif kecil sehingga tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal. Akibatnya, sebagian besar pasokan bahan pangan masih bergantung pada daerah lain, baik dari kabupaten sekitar maupun wilayah lain di Jawa Barat. Ketergantungan pasokan dari luar daerah ini menyebabkan Kota Sukabumi rentan terhadap gangguan distribusi, kenaikan biaya transportasi, perubahan cuaca, serta ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kondisi tersebut menjadikan stabilisasi harga pangan sebagai agenda penting yang membutuhkan strategi pemerintah daerah secara terencana, responsif, dan berkelanjutan.

Secara empiris, fluktuasi harga pangan pokok di Kota Sukabumi terlihat pada beberapa komoditas strategis. Berdasarkan hasil analisis data monitoring harga harian yang diolah peneliti, komoditas seperti cabai merah, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih menunjukkan fluktuasi harga yang cukup tinggi, yaitu sekitar 7-31%, dengan cabai merah sebagai komoditas yang mengalami gejolak paling tinggi. Sementara itu, komoditas lain seperti beras premium, beras medium, minyak goreng, dan daging sapi menunjukkan kondisi yang relatif lebih stabil dengan fluktuasi bulanan sekitar 1-4%. Perbedaan karakteristik fluktuasi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan komoditas, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan pasokan, distribusi, koordinasi antar-lembaga, serta kemampuan pemerintah daerah dalam membaca dinamika pasar.

Salah satu bentuk intervensi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga keterjangkauan harga pangan adalah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Bersubsidi. Program ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketersediaan komoditas strategis, meredam lonjakan harga, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan pokok, serta mencegah praktik penimbunan yang dapat memperburuk gejolak harga. Pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama pada periode ketika terjadi peningkatan permintaan masyarakat.



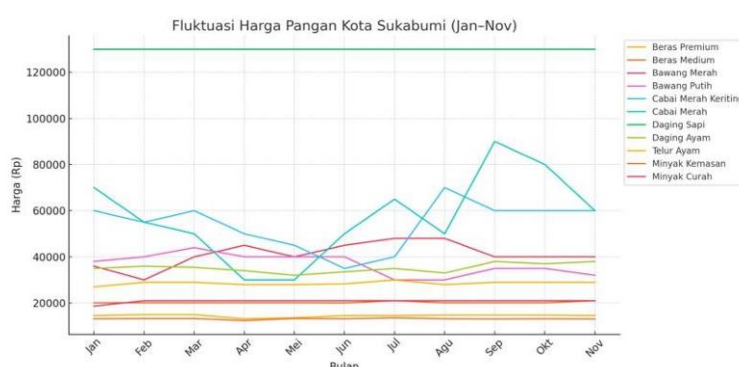
Gambar 1.1 Gerakan Pangan Murah Serentak Kota Sukabumi 2025 Dan Operasi Pasar Bersubsidi Kota Sukabumi 2025

Sumber : KDP Kota Sukabumi

Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

terhadap ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilitas pasokan pangan pokok. Di tingkat daerah, komitmen ini juga diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 yang menekankan peningkatan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

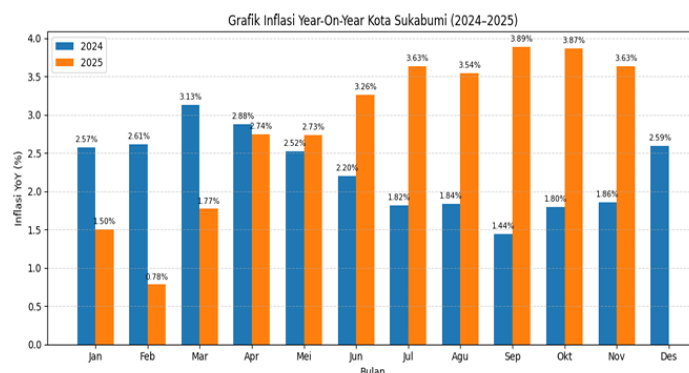
Namun demikian, pelaksanaan program stabilisasi harga pangan belum sepenuhnya mampu menghilangkan gejolak harga di tingkat pasar. Berdasarkan grafik harga pangan Kota Sukabumi periode Januari November, terlihat bahwa beberapa komoditas masih mengalami kenaikan yang cukup mencolok, terutama pada periode menjelang dan setelah hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Komoditas bawang merah dan cabai mengalami lonjakan harga yang signifikan, sementara beberapa komoditas lain ikut terdampak oleh perubahan permintaan dan distribusi (Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB, 2016). Fenomena ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan tidak cukup dipahami sebagai gejala musiman, melainkan sebagai indikator adanya tantangan dalam sistem distribusi, pengendalian pasokan, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.



Gambar 1.2 Grafik Pangan Kota Sukabumi

Sumber : Sukabumiku.id. (2025)

Kondisi tersebut semakin penting untuk dikaji karena pergerakan harga pangan berkaitan langsung dengan inflasi daerah. Data inflasi Kota Sukabumi menunjukkan bahwa peningkatan harga pangan pokok pada periode Mei hingga bulan-bulan berikutnya berkontribusi terhadap tekanan inflasi daerah. Bahkan, dalam proposal penelitian disebutkan bahwa Kota Sukabumi menjadi salah satu kota dengan angka inflasi tertinggi di Jawa Barat, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 1,22 persen pada tahun 2025 (Fatimah, 2025). Hal ini menegaskan bahwa stabilitas harga pangan bukan hanya isu sektor pangan, tetapi juga bagian dari agenda pengendalian inflasi, perlindungan daya beli, dan tata kelola ekonomi daerah (Rodiyah, Sari, & Abdullah, 2021).



Gambar 1.3 Grafik Batang Inflasi Kota Sukabumi

Sumber: BPS Kota Sukabumi, (2025)

Kajian mengenai strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Indraswari, Anjani, & Jamal (2024), meneliti kebijakan pasar murah Pemerintah Kota Surabaya sebagai strategi stabilisasi harga pangan pokok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasar murah dapat menurunkan harga pangan, khususnya beras, minyak goreng, dan gula, meskipun dampaknya cenderung bersifat sementara. Efektivitas program dipengaruhi oleh kesiapan stok, jangkauan lokasi pelaksanaan, serta koordinasi antar-SKPD. Nathan (2025) dalam studinya tentang strategi pemerintah daerah di Kabupaten Merauke menyoroti sinergi kebijakan dan administrasi publik dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penelitian tersebut mengungkap berbagai hambatan struktural dan institusional, seperti fragmentasi kelembagaan, kapasitas birokrasi yang lemah, serta kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Sementara itu, penelitian Sasongko (2024) mengenai operasi pasar dan pasar murah menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dapat menekan kenaikan harga pangan, tetapi tidak selalu memberikan dampak jangka panjang apabila tidak didukung oleh monitoring, pengawasan harga, dan penguatan rantai pasok secara berkelanjutan.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat celah penelitian yang penting untuk dikembangkan. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan pasar murah atau operasi pasar sebagai instrumen kebijakan jangka pendek, belum banyak membahas bagaimana strategi pemerintah daerah dirumuskan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, hingga evaluasi. Kedua, penelitian mengenai stabilisasi harga pangan lebih banyak dilakukan di kota besar, sedangkan kajian pada kota menengah seperti Kota Sukabumi masih terbatas. Padahal, Kota Sukabumi memiliki karakteristik yang khas, yaitu keterbatasan produksi pangan lokal, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta tekanan inflasi yang cukup tinggi. Ketiga, belum banyak penelitian yang menganalisis strategi stabilisasi harga pangan dengan menggunakan perspektif manajemen strategis sektor publik, khususnya melalui kerangka *The Strategy Change Cycle* dari John M. Bryson.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis strategi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok secara lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis sektor publik. Penelitian ini tidak hanya melihat program Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Bersubsidi sebagai kegiatan teknis, tetapi sebagai bagian dari proses strategis pemerintah daerah dalam mengidentifikasi mandat organisasi, membaca lingkungan eksternal dan internal, merumuskan isu strategis, menyusun strategi, mengimplementasikan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan manajemen strategis daerah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat kebijakan stabilisasi harga pangan pokok.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut. Dengan memahami kedua aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok di Kota Sukabumi.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok. Fokus teori diarahkan pada manajemen strategi sektor publik, peran pemerintah daerah, stabilitas harga pangan, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Manajemen strategi dalam sektor publik merupakan proses sistematis yang digunakan organisasi pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dalam mencapai tujuan publik (Sudiantini & Hadita, 2022). Dalam konteks penelitian ini, manajemen strategi digunakan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Sukabumi menyusun langkah-langkah pengendalian harga pangan pokok melalui pemantauan harga, penguatan distribusi, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Bersubsidi. Strategi tersebut penting karena Kota Sukabumi memiliki keterbatasan produksi pangan lokal dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *The Strategy Change Cycle* dari Bryson, J. M. (2024). Teori ini menjelaskan bahwa perencanaan strategis organisasi publik dilakukan melalui proses berkelanjutan, mulai dari penyepakatan proses perencanaan, identifikasi mandat organisasi, perumusan misi dan nilai, analisis lingkungan internal dan eksternal, identifikasi isu strategis, perumusan strategi, pengesahan strategi, pembentukan visi, implementasi, hingga evaluasi strategi. Kerangka ini relevan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Sukabumi karena stabilisasi harga pangan tidak cukup dilakukan melalui program sesaat, tetapi memerlukan proses strategis yang terencana, adaptif, dan berkelanjutan.

Stabilitas harga pangan pokok merupakan kondisi ketika harga komoditas pangan berada pada tingkat yang wajar dan tidak mengalami gejolak tajam (Reza, Putra, & Nikmah, 2023). Stabilitas harga pangan berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, inflasi daerah, dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam konteks Kota Sukabumi, fluktuasi harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai merah, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih, sedangkan komoditas seperti beras, minyak goreng, dan daging sapi relatif lebih stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian harga pangan membutuhkan perhatian terhadap pasokan, distribusi, permintaan musiman, serta koordinasi antaraktor kebijakan. Beberapa penelitian terkini memperkuat perspektif ini, misalnya, Sulu, Tulung, & Kumayas (2026) mengevaluasi efektivitas Gerakan Pangan Murah dalam menstabilkan harga dan ketersediaan pangan di tingkat kelurahan, sementara Primastuti (2023) menekankan peran keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi TPID untuk pengendalian inflasi daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui pasar murah dan operasi pasar dapat membantu menekan kenaikan harga pangan, meskipun dampaknya sering kali bersifat sementara. Penelitian Indraswari, et al. (2024) tentang pasar murah di Kota Surabaya menunjukkan bahwa efektivitas program dipengaruhi oleh kesiapan stok, ketepatan lokasi, dan koordinasi antarinstansi. Sementara itu, penelitian Sasongko (2024) menunjukkan bahwa operasi pasar dapat menekan kenaikan harga, tetapi perlu didukung oleh monitoring, pengawasan harga, dan distribusi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki posisi berbeda karena tidak hanya melihat program stabilisasi harga sebagai kegiatan teknis, tetapi menganalisisnya sebagai strategi pemerintah daerah secara menyeluruh. Dengan menggunakan kerangka Bryson, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana strategi Pemerintah Kota Sukabumi dirumuskan, dilaksanakan, dievaluasi, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya menjaga stabilitas harga pangan pokok.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, implementasi, serta evaluasi kebijakan stabilisasi harga pangan di tingkat daerah dengan menggunakan kerangka *The Strategy Change Cycle* dari John M. Bryson.

Penelitian dilaksanakan di Kota Sukabumi pada bulan November 2025 sampai Juni 2026. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki kewenangan, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga pangan. Penelitian ini melibatkan lima informan utama, yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kota Sukabumi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaksana Program Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Bersubsidi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, serta pedagang pasar sebagai informan pendukung. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data harga pangan, data inflasi, jurnal ilmiah, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan program stabilisasi harga pangan, wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan kunci, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah data dan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian harga pangan pokok.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik seperti menurut Sugiyono (2019), yang membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Model analisis yang digunakan mengacu pada teori *The Strategy Change Cycle* John M. Bryson, yang digunakan untuk membaca strategi pemerintah melalui aspek perencanaan, mandat organisasi, misi dan nilai, analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Model ini relevan karena naskah penelitian memang memosisikan strategi Pemerintah Kota Sukabumi sebagai fokus utama dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Stabilitas harga pangan pokok merupakan salah satu isu strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, pengendalian

inflasi, dan ketahanan pangan (Raadschelders, 2015). Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, Pemerintah Kota Sukabumi telah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan harga secara berkala, Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Bersubsidi, serta kerja sama dengan Bulog, distributor, dan pedagang pasar. Strategi tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan stabilisasi harga pangan.

Strategi Pemerintah Kota Sukabumi dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan Pokok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi stabilisasi harga pangan di Kota Sukabumi tidak dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah secara terpisah, melainkan melalui mekanisme koordinasi antarinstitusi yang difasilitasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) melakukan pemantauan harga serta pengawasan perdagangan, sedangkan TPID menjadi forum koordinasi dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan. Model koordinasi tersebut memungkinkan pertukaran informasi secara cepat sehingga pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi pasar. Pola pembagian peran tersebut ditegaskan oleh informan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Sukabumi selaku pihak yang menjalankan mandat kebijakan di lapangan.

“Dasar pelaksanaan program kami mengacu pada regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Pangan dan kebijakan daerah terkait ketahanan pangan. Dari aturan itu kemudian direalisasikan ke dalam program kerja harian, bulanan, hingga tahunan seperti monitoring harga, koordinasi distribusi pangan, dan kegiatan stabilisasi harga di masyarakat.” (Hasil wawancara Ketua Bidang Ketahanan Pangan DPK3 Kota Sukabumi, 2026).

Pada tingkat implementasi, intervensi utama dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Bersubsidi. Kedua program tersebut bertujuan menyediakan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar sehingga mampu menjaga keterjangkauan pangan, terutama ketika terjadi lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena mampu meningkatkan akses terhadap komoditas strategis dengan harga yang lebih terjangkau. Namun demikian, dampak program masih bersifat jangka pendek karena pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan kondisi pasokan pangan.

Selain intervensi langsung kepada masyarakat, pemerintah juga melakukan pemantauan harga secara berkala pada berbagai pasar tradisional sebagai dasar dalam menentukan komoditas prioritas yang memerlukan penanganan segera (Ariestiyanti & Adrison, 2020). Informasi harga yang diperoleh kemudian dibahas dalam forum koordinasi TPID untuk menentukan bentuk kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Sukabumi tidak hanya bersifat reaktif melalui operasi pasar, tetapi juga didukung oleh proses monitoring yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Tabel 1.1 Ringkasan Strategi Pemerintah Kota Sukabumi dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan Pokok

Strategi	Tujuan	Temuan
Koordinasi TPID	Menyelaraskan kebijakan stabilisasi harga	Koordinasi lintas OPD menjadi kekuatan utama pengambilan keputusan
Monitoring harga pangan	Mengidentifikasi komoditas prioritas	Menjadi dasar penentuan waktu intervensi pemerintah
Gerakan Pangan Murah	Menjaga keterjangkauan harga pangan	Efektif membantu masyarakat namun bersifat sementara
Operasi Pasar Bersubsidi	Menekan lonjakan harga	Efektif pada kondisi tertentu tetapi belum menyelesaikan akar masalah
Kerja sama Bulog dan distributor	Menjamin ketersediaan pasokan	Mendukung distribusi namun masih dipengaruhi faktor eksternal

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Analisis Strategi Berdasarkan Strategy Change Cycle Bryson

Apabila dianalisis menggunakan kerangka *Strategy Change Cycle* Bryson, strategi Pemerintah Kota Sukabumi telah mencerminkan sebagian besar tahapan perencanaan strategis sektor publik. Tahap awal berupa *initiating and agreeing on strategic planning process* diwujudkan melalui koordinasi TPID yang melibatkan berbagai OPD dalam penyusunan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara kolaboratif sehingga setiap instansi memiliki peran yang jelas dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Pada dimensi *identifying organizational mandates*, pemerintah daerah memiliki legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan monitoring harga, pengendalian distribusi, serta program stabilisasi harga yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi yang diterapkan bukan sekadar

respons terhadap gejolak harga, tetapi merupakan implementasi dari mandat pemerintah dalam menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Pada aspek *clarifying mission and values*, penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah berorientasi pada perlindungan daya beli masyarakat melalui penyediaan pangan dengan harga yang terjangkau. GPM dan Operasi Pasar Bersubsidi tidak hanya menjadi instrumen pengendalian inflasi, tetapi juga mencerminkan nilai pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Bryson bahwa strategi organisasi publik harus dibangun berdasarkan nilai publik (*public value*) sebagai tujuan utama organisasi.

Selanjutnya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah telah melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal dan internal sebelum menentukan strategi. Faktor eksternal yang paling berpengaruh meliputi ketergantungan pasokan dari luar daerah, kondisi cuaca, gangguan distribusi, dan meningkatnya permintaan pada hari besar keagamaan. Di sisi lain, kekuatan internal terletak pada koordinasi lintas OPD melalui TPID, sedangkan kelemahannya meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam pengawasan pasar. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah menetapkan komoditas prioritas melalui monitoring harga harian sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan dilaksanakan. Kerentanan terhadap pasokan luar daerah tersebut disampaikan langsung oleh informan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Sukabumi sebagai berikut.

“Sebagian besar pasokan cabai dan bawang di Kota Sukabumi berasal dari luar daerah. Jadi ketika di daerah pemasok terjadi gagal panen atau cuaca buruk, dampaknya langsung terasa terhadap kenaikan harga di pasar lokal.” (Hasil wawancara Ketua Bidang Ketahanan Pangan DPK3 Kota Sukabumi, 2026).

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Kota Sukabumi telah memenuhi sebagian besar tahapan *Strategy Change Cycle*. Namun demikian, implementasi strategi masih lebih dominan sebagai kebijakan responsif jangka pendek dibandingkan strategi preventif jangka panjang. Program GPM dan Operasi Pasar Bersubsidi terbukti mampu meredam gejolak harga pada periode tertentu, tetapi belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah yang menjadi akar permasalahan stabilitas harga pangan.

Tabel 1.2 Analisis Strategi Pemerintah Kota Sukabumi Berdasarkan Kerangka Bryson

Dimensi Bryson	Temuan Penelitian	Analisis
Kesepakatan proses strategis	Perencanaan dilakukan melalui koordinasi TPID dan OPD terkait	Koordinasi awal sudah berjalan, tetapi perlu diperkuat dengan agenda jangka panjang

Dimensi Bryson	Temuan Penelitian	Analisis
Mandat organisasi	Didukung UU Pangan dan Perwal No. 39 Tahun 2024	Dasar hukum cukup kuat sebagai legitimasi kebijakan
Misi dan nilai	Menjaga keterjangkauan pangan dan daya beli masyarakat	Strategi memiliki orientasi kepentingan publik
Penilaian lingkungan eksternal	Harga dipengaruhi cuaca, distribusi, pasokan luar daerah, dan permintaan musiman	Kerentanan struktural masih tinggi
Penilaian lingkungan internal	TPID dan OPD terkait berkoordinasi cukup baik	Kapasitas koordinasi baik, tetapi anggaran dan SDM pengawasan terbatas
Identifikasi isu strategis	Komoditas prioritas ditentukan berdasarkan kenaikan harga dan dampak inflasi	Pemerintah mulai menggunakan data sebagai dasar intervensi
Perumusan strategi	GPM dan Operasi Pasar Bersubsidi menjadi instrumen utama	Strategi realistis, tetapi masih dominan jangka pendek
Implementasi dan evaluasi	Program dijalankan melalui titik distribusi dan monitoring harga	Perlu evaluasi berbasis dampak dan keberlanjutan

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil penelitian dan teori Bryson, 2026

Faktor Pendukung Strategi Pemerintah Kota Sukabumi

Keberhasilan strategi stabilisasi harga pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan sehingga pemerintah memiliki legitimasi dalam melakukan intervensi pasar. Kedua, koordinasi lintas sektor melalui TPID mampu mempercepat proses pengambilan keputusan. Ketiga, sistem pemantauan harga yang dilakukan secara rutin membantu pemerintah mengidentifikasi komoditas prioritas sebelum gejolak harga semakin meluas. Keempat, kerja sama dengan Bulog, distributor, dan pedagang pasar mendukung kelancaran distribusi serta menjaga ketersediaan stok pangan di Kota Sukabumi. Kekuatan koordinasi antar-OPD ini turut dikonfirmasi oleh informan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.

“Secara SDM dan koordinasi antar OPD sebenarnya sudah cukup baik karena masing-masing instansi memahami tugasnya. Kendala yang sering dihadapi biasanya terkait keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan program intervensi seperti operasi pasar atau GPM (Gerakan Pangan Murah) belum bisa dilakukan secara terus-menerus dalam skala besar.” (Hasil wawancara Ketua Bidang Ketahanan Pangan DPK3 Kota Sukabumi, 2026).

Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Kota Sukabumi

Di samping faktor pendukung, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas strategi. Hambatan utama adalah tingginya ketergantungan Kota Sukabumi terhadap pasokan pangan dari luar daerah sehingga pemerintah tidak memiliki kendali penuh terhadap perubahan harga. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Bersubsidi belum dapat dilakukan

secara berkelanjutan. Keterbatasan jumlah personel dalam pengawasan pasar juga mengurangi efektivitas monitoring harga dan distribusi barang. Faktor eksternal seperti perubahan cuaca, gagal panen di daerah pemasok, serta meningkatnya biaya transportasi turut memperbesar risiko fluktuasi harga pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola faktor internal sekaligus mengantisipasi dinamika lingkungan eksternal. Keterbatasan personel pengawasan tersebut disoroti langsung oleh informan dari Diskumindag Kota Sukabumi.

“Jumlah personel untuk monitoring pasar masih terbatas dibandingkan luas cakupan pengawasan, sehingga pengawasan harga dan distribusi belum bisa dikatakan optimal jika dibandingkan dengan personil pengawasan.” (Hasil wawancara Diskumindag Kota Sukabumi, 2026).

Kesesuaian dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Penelitian Indraswari, et al. (2024) menunjukkan bahwa program pasar murah di Surabaya mampu menurunkan harga pangan pokok, tetapi efektivitasnya bersifat sementara dan dipengaruhi oleh kesiapan stok, distribusi, serta koordinasi lintas instansi. Penelitian Nathan (2025) di Merauke menyoroti pentingnya sinergi kebijakan dan administrasi publik untuk mengatasi fragmentasi institusional, yang paralel dengan tantangan koordinasi TPID di Sukabumi. Sementara penelitian Sasongko (2024) menunjukkan bahwa operasi pasar dan pasar murah efektif menekan kenaikan harga, tetapi tidak memberikan dampak jangka panjang apabila tidak didukung monitoring, distribusi berkelanjutan, dan pengawasan harga secara adaptif.

Kesesuaian tersebut terlihat jelas dalam kasus Kota Sukabumi. GPM dan Operasi Pasar Bersubsidi mampu membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga lebih terjangkau, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan fluktuasi harga karena penyebab utamanya bersifat struktural. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa operasi pasar dan pasar murah merupakan strategi yang efektif dalam jangka pendek, tetapi membutuhkan penguatan tata kelola distribusi dan kebijakan jangka panjang agar dampaknya lebih berkelanjutan.

Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi berbeda. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menekankan efektivitas pasar murah atau operasi pasar sebagai program, penelitian ini menempatkan strategi stabilisasi harga pangan dalam kerangka manajemen strategis pemerintah daerah. Dengan menggunakan perspektif Bryson, penelitian ini tidak hanya melihat apakah program berjalan, tetapi juga bagaimana mandat, misi, koordinasi, lingkungan eksternal-internal, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi saling

memengaruhi. Di sinilah letak nilai tambah penelitian ini: masalah pangan tidak hanya dibaca sebagai urusan harga, tetapi sebagai urusan tata kelola strategis.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi *The Strategy Change Cycle* dari Bryson dalam menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program intervensi, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Bersubsidi, tetapi juga oleh keterpaduan antara identifikasi isu strategis, koordinasi lintas perangkat daerah, kapasitas organisasi, implementasi kebijakan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga memperluas penerapan teori Bryson pada konteks stabilisasi harga pangan di daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar wilayah. Dengan demikian, aspek antisipasi terhadap risiko eksternal, seperti gangguan distribusi, perubahan cuaca, dan fluktuasi pasokan, perlu menjadi bagian penting dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi perlu menggeser strategi stabilisasi harga pangan dari pendekatan yang cenderung reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan berkelanjutan. Mengingat komoditas yang paling sering mengalami fluktuasi harga adalah cabai merah, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih, pemerintah dapat memprioritaskan pengembangan komoditas tersebut melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, pengembangan urban farming, serta penguatan kemitraan dengan kelompok tani di wilayah penyangga Kabupaten Sukabumi. Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan perlunya penguatan cadangan pangan daerah, khususnya untuk komoditas dengan tingkat volatilitas harga yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian ketika terjadi gejolak harga di pasar.

Dari aspek pembiayaan, penguatan strategi stabilisasi harga pangan dapat didukung melalui alokasi APBD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Diskumindag, serta diperkuat melalui koordinasi TPID dengan Bulog, distributor, dan pedagang pasar untuk menjaga kontinuitas pasokan pangan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian harga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap intervensi pasar yang bersifat insidental.

Sebagai target implementasi yang lebih terukur, dalam jangka pendek (1 tahun) pemerintah dapat meningkatkan intensitas pemantauan harga harian terhadap komoditas prioritas serta memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok utama guna menjamin kelancaran distribusi. Selanjutnya, dalam jangka menengah (2-3 tahun), pemerintah dapat

mengembangkan sentra hortikultura skala perkotaan dan memperkuat cadangan pangan daerah sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah secara bertahap. Dengan langkah tersebut, strategi stabilisasi harga pangan di Kota Sukabumi diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan gejolak harga sesaat, tetapi juga mampu membangun sistem pengelolaan pangan daerah yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok yang diimplementasikan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Bersubsidi, pemantauan harga, dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbukti cukup efektif meredam gejolak harga dalam jangka pendek. Pelaksanaan strategi ini didukung oleh landasan hukum yang kuat (UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Kota No. 39 Tahun 2024) serta kerja sama yang baik dengan Bulog dan pihak distributor. Namun, strategi yang dijalankan masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan struktural. Faktor penghambat utama efektivitas kebijakan ini adalah tingginya ketergantungan Kota Sukabumi terhadap pasokan pangan dari luar daerah, ditambah dengan keterbatasan anggaran program dan minimnya personel pengawasan di lapangan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi perlu menggeser arah kebijakannya menuju pendekatan yang lebih preventif. Upaya ini dapat diwujudkan dengan memperkuat cadangan pangan daerah, mengembangkan komoditas unggulan lokal, serta meninjau kembali alokasi anggaran pengawasan agar stabilitas harga dan ketahanan pangan dapat tercapai secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ariestiyanti, D., & Adrison, V. (2020). Revitalisasi pasar dan stabilisasi harga komoditas pangan. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 14(2), 261–282.
- Indraswari, G. A., Anjani, R. R., & Jamal, A. (2024). Evaluasi keputusan pemerintah melalui pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Surabaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2420>
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: : Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah*, 1(4), 1573-1591. doi.org/10.63822/9y5pyw47
- Primastuti, A., Labolo, M., Sartika, I., & Akbar, B. (2023). Keterlibatan Masyarakat dalam Kolaborasi Pengendalian Inflasi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2319-2333.
- Reza, A., Putra, R., & Nikmah, S. (2023). Kebijakan stabilisasi harga pangan daerah dalam

- mengendalikan inflasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 4(2), 120–134.
- Rodiyah, F., Sari, N., & Abdullah, A. (2021). Administrasi publik dalam konteks kebijakan daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 22–34.
- Sasongko, R. W. (2024). Effectiveness of cheap market operation policy in Bandung City. *Journal of Governance*, 9(1), 143-153.
- Sulu, A. T., Tulung, T., & Kumayas, N. (2026). Efektivitas Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam Menstabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan. *Jurnal Governance*, 4(2).
- Bryson, J. M. (2024). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Raadschelders, J. C. N. (2015). *Government: A public administration perspective*. Routledge.
- Sudiantini, D., & Hadita. (2022). *Manajemen strategi* (Edisi millennium, Jilid 1). Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Kota Sukabumi. (2024). *Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025–2029*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- BPS Kota Sukabumi. (2025, 1 Desember). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Sukabumi: November 2025* [Berita Resmi Statistik]. Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi.
- Fatimah, S. (2025, 18 Juli). *Harga kebutuhan naik, Sukabumi cetak rekor inflasi tertinggi di Jawa Barat*. detikJabar.
- Pusat Kajian Hortikultura Tropika – IPB. (2016, 29 Februari). *Rakor cabai dan bawang merah*.
- Sukabumiku.id. (2025, 10 Juli). *Cek harga bahan pokok di pasar Kota Sukabumi*. Sukabumiku.id.